



Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam di Era 4.0

Latifah Sapta Wijiutami

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Latifah2000031229@webmail.uad.ac.id

Khusnul Khasanah

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Khusnul2000031230@webmail.uad.ac.id

DOI: 10.15548/mrb.v5i2.22

Received: 01 Agustus 2022

Revised: 31 Agustus 2022

Approved: 30 September 2022

Abstrak: Sangat penting untuk mengembangkan kebijakan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah disusun dapat tercapai secara optimal. Untuk merumuskan kebijakan pendidikan, kita perlu mengetahui berbagai model pembuatan kebijakan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan informasi mengenai model pembuatan kebijakan pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai solusi bagi pembuatan kebijakan pendidikan. Teks ini menggunakan studi sastra. Artikel ini ditulis dengan menelaah 15 makalah nasional tentang kebijakan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan beberapa model pembuatan kebijakan pendidikan: model kelembagaan, model sistem, model penelitian, model elite, model rasional, model inkremental, dan model, model pendekatan analisis kebijakan dan model pendekatan implementasi kebijakan publik. Kajian ini juga menunjukkan bahwa model pembuatan kebijakan yang tepat digunakan di Indonesia adalah Model Analisis Kebijakan Pendidikan (Best Practices) dan Model Implementasi Kebijakan Publik.

Kata kunci: Kebijakan, pendidikan, konstruksi, analisis

Abstract: It is very important to develop educational policies so that the educational goals that have been prepared can be achieved optimally. To formulate education policy, we need to know various models of education policy making. This article aims to examine and provide information about the model of education policy making so that it can be used as a solution for education policy making. This text uses literary studies. This article was written by reviewing 15 national papers on education policy. The results of the study show several models of education policy making: institutional models, systems models, research models, elite models, rational models, incremental models, and models, models of policy analysis approaches and models of public policy implementation approaches. This study also shows that the appropriate policy-making model used in Indonesia is the Education Policy Analysis Model (Best Practices) and the Public Policy Implementation Model.

Keywords: Policy, education, construction, analysis

PENDAHULUAN

Diharapkan pendidikan dapat menaikkan kelanjutan dan keberhasilan kehidupan bermasyarakat. Sebagai proses pembelajaran, pendidikan harus menciptakan individu dan masyarakat yang religius dengan integritas dan kecerdasan individu. Sebagai bentuk proses ekonomi, pendidikan

adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, pendidikan sebagai proses sosial budaya terus berlangsung tanpa henti di dalam Sosbud.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional no 2 tahun 1986 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam sistem yang bertujuan untuk memaksimalkan

pencapaian tujuan pendidikan Negara yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia, baik sosial, intelektual, spiritual, maupun kemampuan profesional.

Namun, permasalahan penduduk Indonesia di bidang pendidikan terus berkembang. Salah satu permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah kualitas pengajaran di semua jenjang dan satuan pengajaran, terutama di tingkat SD dan SMP masih rendah. Meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air, baik dalam pengembangan kurikulum nasional maupun daerah, peningkatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur, pengadaan buku dan perangkat pembelajaran, serta peningkatan kualitas manajemen sekolah. memperbaikinya. Namun mutu pendidikan belum juga menunjukkan peningkatan yang meningkat.

Lembaga pendidikan perlu memperhatikan karakteristik, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hendaknya dapat memberikan respon kontekstual sesuai dengan orientasi pembangunan daerah. Dalam perumusan kebijakan keputusan untuk pendidikan hendaknya tetap mendengarkan aspirasi masyarakat yang ada.

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah pegangan yang bersifat global, yang diharuskan memiliki manfaat pelaksanaan supaya dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kebijakan pendidikan juga harus dikembangkan atau dirumuskan oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan dibidang itu, agar tidak menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan dibagian luar latihan pendidikan.

Selain itu, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan, dan tulisan ini membahas bagaimana proses perumusan kebijakan pendidikan berdasarkan konsep kebijakan, pemahaman kebijakan pendidikan, dan beberapa aspek

pendidikan. pertimbangkan di mana untuk memulai. Kebijakan, Standar Kebijakan Pendidikan dan proses pengembangan kebijakan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), dimaksud untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan menentukan tindakan yang akan diambil dalam kegiatan ilmiah. Dalam penelitian ini data diperoleh dan digali dari berbagai buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yang menggambarkan secara rinci apa yang secara objektif konsisten dengan data yang dikumpulkan. Dan penelitian terkait sebelumnya dilakukan oleh orang lain. Kajian ini bersifat filosofis. Dengan kata lain, itu adalah studi yang menggambarkan dan melaporkan situasi, dan objek tertentu dianalisis lebih kritis. Saat mengumpulkan bahan pustaka, peneliti melakukannya dengan membaca dan mereview buku, surat kabar, dan bahan informasi lainnya, terutama yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan

Terkait dengan kata politik adalah kata politik yang berarti berurusan dengan masalah dan kepentingan umum, dan juga dapat diartikan sebagai cabang eksekutif. Kebijakan pendidikan berasal dari dua kata “politik” dan “pendidikan”. Tilaar dan Nugroho adalah pakar di bidang pendidikan dan meyakini bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil pengembangan dari rangkaian proses yang harus dilaksanakan dan langkah-langkah spesifik dalam pendidikan yang menunjukkan visi dan misi pendidikan. Mengisi formasi untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah pada umumnya merumuskan masalah untuk menjadi subyek kebijakan. Rumusan masalah itu sendiri ditandai dengan menggambarkan masalah dan memperoleh data tentang keadaan masalah sehingga suatu kebijakan ada. Merumuskan isu-isu politik yang ada dalam pendidikan menyiratkan serangkaian proposal nyata untuk tindakan, upaya yang lebih baik untuk berkompromi dan mendukung proposal yang sah, dan memantau tindakan kolektif.

Kebijakan pendidikan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan baik di tingkat institusional maupun nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia secara moral, material, fisik dan mental. Untuk itu, pembuatan kebijakan pendidikan adalah cara untuk menentukan hambatan yang dibentuk oleh pembuat kebijakan yang diberdayakan untuk mengatasi kendala yang ada dan banyak alternatif politik. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah cara terbaik untuk memilih rencana.

Mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien diperlukan kebijakan pendidikan yang strategis. Memasukkan komponen pendidikan dalam perumusan kebijakan menambah poin baik kualitas kebijakan yang dirumuskan maupun motivasi implementasi kebijakan. Dilihat dari vitalitas kebijakan, perlu dirumuskan dalam beberapa fase. Khususnya: fase perumusan masalah/ penentuan agenda, fase prognosis/pengembangan kebijakan, fase rekomendasi kebijakan/ adopsi kebijakan, fase pemantauan kebijakan/ pemantauan kebijakan/ pelaksanaan/ proses dan proses. Tahap Kebijakan/ Evaluasi/ Evaluasi Kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan dengan baik, harus diimplementasikan agar tidak hanya sekedar catatan deskriptif yang tidak bermakna. Keberhasilan implementasi kebijakan dalam pemecahan masalah ditentukan oleh beberapa variabel, antarlain kapasitas pelaku implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya dan regulasi.

Dan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, tahap selanjutnya adalah

evaluasi untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut on track, menemukan keterbatasan dan hambatan yang dihadapi, serta memahami konsekuensi atau dampak dari kebijakan tersebut. Seperti dasar untuk merumuskan kebijakan baru. Kebijakan secara umum dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: Kebijakan umum adalah kebijakan yang bertindak baik sebagai pedoman positif maupun negatif atau petunjuk pelaksanaan yang mencakup wilayah yang terkena dampak atau seluruh institusi. Pedoman Pelaksanaan adalah pedoman yang menjelaskan pedoman umum, tetapi di tingkat pusat, peraturan pemerintah digunakan untuk menegakkan hukum. Kebijakan operasional tunduk pada kebijakan teknis dan kebijakan implementasi. Proses pembuatan dan implementasi kebijakan dibagi menjadi beberapa fase: mempolitisasi isu (menetapkan agenda), mengembangkan dan menyetujui program, melaksanakan program, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

Perencanaan Pendidikan

Merencanakan pada dasarnya menentukan kebijakan yang hendak diambil untuk dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan sebuah strategi agar supaya hasil yang hendak dicapai sesuai dengan harapan yang diinginkan bersama.

Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah kedua setelah kebijakan tersebut dirumuskan, karena sebuah perencanaan hanya akan menjadi document tertulis ketika tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan erat kaitannya dengan pengorganisasian, penggerakan dan kepemimpinan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu tujuan, sumberdaya, pelaksana, serta organisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor yang masing-masing saling terkait. Jadi,

yang pertama adalah tujuannya. Setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas, dan implementasi kebijakan yang sukses mengharuskan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Sumber daya kedua. Sumber daya yang diperlukan untuk menegakkan kebijakan dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, atau sumber daya lainnya.

Dengan demikian, sumber daya adalah salah satu faktor terpenting untuk keberhasilan penegakan kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya yang tepat, kebijakan hanya tinggal di atas kertas sebagai dokumentasi. Pelaksana ketiga. Keberhasilan implementasi kebijakansangat tergantung pada karakter dan kualifikasi pelaksana kebijakan. Tanpa karakter dan kualifikasi pelaksana kebijakan, kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, kebijakan menjadi kurang efektif ketika pelaksana kebijakan memiliki perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Di atas segalanya, karakter dan kualitas yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pelaksana politik. Komitmen, Integritas, Demokratisasi, Kompetensi, Konsistensi. Terakhir, struktur organisasi. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dan signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek kunci dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur atau SOP (standard operating procedure). SOP ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Penilaian merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kegiatan tersebut, dan hasil dari informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan kebijakan di masa yang akan datang. Penilaian adalah teknik analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan atau konsekuensinya. Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam menjalankan fungsi

manajemen. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa baik tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Selain itu, kami telah membuat pedoman baru berdasarkan hasil evaluasi.

Aspek Yang Tercakup Dalam Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan pertama didasarkan pada kebutuhan siswa. Kebijakan pendidikan harus bertujuan untuk melatih intelektual organik untuk bertindak sebagai agen revitalisasi masyarakat nasional. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang demokratis. Siswa harus mengembangkan kepribadian mereka sendiri sebagai desainer, pendukung dan aktor dalam masyarakat yang berubah. Kita perlu menyediakan ruang diskusi antara siswa dan pendidik, siswa dan masyarakat, siswa dan negaranya, dan akhirnya siswa dengan kemanusiaan global. Kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan efisiensi.

Kebijakan pendidikan bukan hanya pembentukan tindakan verbal dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kebijakan pendidikan perlu diterapkan di masyarakat dan lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang mempertimbangkan keterampilan di lapangan, sehingga prasyarat kebijakan pendidikan yang efisien adalah sumber daya manusia, keuangan, pelaksanaan bertahap, dan kapasitas penelitian dan pengembangan.

Pendidikan tidak didasarkan pada intuisi atau kebijaksanaan irasional. Kebijakan pendidikan adalah hasil dari merasionalkan berbagai pilihan dan membuat keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan berbagai jenis risiko dan solusi untuk mengelolanya.

Standar Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan memiliki fungsi khusus. Tujuan Pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan. Untuk berkontribusi pada

pendidikan, perlu untuk menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan tepat sasaran. Ada aspek legal dan formal. Tentu saja karena kebijakan pendidikan sudah ada, kebijakan pendidikan harus diakui dan syarat yang harus dipenuhi harus dipenuhi agar sah secara hukum di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di daerah agar dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di daerah.

Kebijakan pendidikan sebagai pedoman yang komprehensif tentunya harus memiliki manfaat operasional untuk pelaksanaan yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa tujuan pendidikan yang ingin dicapai telah tercapai. Kebijakan pendidikan juga memiliki fungsi pendukung keputusan.

Kebijakan pendidikan harus diberdayakan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya agar tidak merugikan pendidikan dan lingkungan non pendidikan. Pengelola pendidikan, pengelola lembaga, dan politisi yang terlibat langsung dalam pendidikan adalah elemen minimal pembuat kebijakan pendidikan. Tentu saja, kebijakan pendidikan tidak bisa lepas dari kondisi yang benar-benar harus ditempuh. Jika sudah bagus akan dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Jika mengandung kesalahan, itu perlu diperbaiki. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah dan efektif mengevaluasi kebijakan pendidikan kepribadian Anda.

Tujuan Dan Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Implementasi Strategi ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sesuatu sistem juga, oleh karena itu harus memiliki sistematika yang jelas dan menyangkut seluruh aspek yang ingin diaturnya. Perlu efektif dan efisien agar kebijakan pendidikan sistematis namun tidak praktis, diskriminatif, rentan secara struktural atau saling berbenturan karena banyak faktor yang hilang. Ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar implementasi di masa depan tidak

menyebabkan cacat hukum internal. Kedua, kebijakan pendidikan eksternal harus terintegrasi dengan kebijakan lain seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, dan kebijakan pendidikan di atas dan di bawahnya.

Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Pendekatan Social Demand Approach (kebutuhan sosial)

Pendekatan tuntutan sosial adalah jenis pendekatan untuk mengembangkan kebijakan pendidikan berdasarkan aspirasi, tuntutan, dan kepentingan masyarakat yang beragam. Dengan pendekatan jenis ini, pembuat kebijakan terlebih dahulu mengkaji dan mengidentifikasi aspirasi yang berkembang dari masyarakat sebelum mengembangkan kebijakan pendidikan untuk dikerjakan.

Pendekatan social demand sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum mengembangkan kebijakan pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setelah menerapkan kebijakan pendidikan. Partisipasi warga dari semua lapisan masyarakat harus dilakukan baik dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam pembuatan kebijakan, dapat diklasifikasikan sebagai jenis pembuatan kebijakan pasif. Artinya kebijakan baru dapat dikembangkan jika diminta oleh masyarakat terlebih dahulu.

Pendekatan Tenaga Kerja

Jenis pendekatan ini berfokus pada penalaran cerdas untuk menemukan orang yang tepat di masyarakat. Pendekatan staf ini tidak mempertimbangkan apakah ada tuntutan dari masyarakat atau apakah masyarakat menuntut kebijakan pendidikan tertentu, tetapi yang penting adalah pandangan pembuat kebijakan. Sebagai pemimpin yang diberdayakan dalam pembuatan kebijakan, pemerintah memiliki legitimasi yang kuat untuk membentuk kebijakan pendidikan. Aspek penting dari

pendekatan kedua ini adalah bahwa pendekatan ini umumnya otoriter.

Proses Perumusan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik, seperti yang disarankan oleh para peneliti awal. Pengembangan kebijakan publik merupakan salah satu dari banyak tahapan dalam proses pengembangan dan implementasi kebijakan publik. Menurut Dan, keputusan politik adalah pengembangan dan integrasi alternatif pemecahan masalah. Budi Winarno menjelaskan bahwa kebijakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan berlomba-lomba setiap pilihan yang akan dipilih. Pemimpin Partai Islam Chokroamid Jojo menyebut pembuatan kebijakan sebagai alternatif yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir. Untuk memahami proses pembuatan kebijakan, kita perlu memahami aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Penetapan tujuan merupakan langkah penting dalam siklus proses pembuatan kebijakan. Menerapkan tujuan juga merupakan kegiatan yang paling penting. Karena hanya tujuan yang dapat memberikan arah dan legitimasi terhadap keputusan publik. Kenyataannya, pembuat kebijakan sering bingung ketika menetapkan tujuan kebijakan. Solusi seringkali dianggap lebih penting daripada masalah. Hanya tujuan yang dapat memberikan arah dan legitimasi terhadap keputusan publik, jadi ini adalah solusi yang baik, bahkan jika resistensi sering terjadi. Kenyataannya, para pengambil keputusan kebijakan seringkali tersesat dalam menetapkan tujuan kebijakan. Solusi seringkali dianggap lebih penting daripada masalah. Tetapi dalam banyak kasus, yang terjadi sebaliknya, dan ketika diterapkan pada masalah yang salah, solusi yang tepat gagal.

Berdasarkan pemahaman dan pendapat beberapa ahli di atas, keputusan kebijakan memecahkan masalah yang ada dan memecahkan masalah yang dibentuk oleh pembuat kebijakan. Solusi lain adalah yang terbaik untuk kebijakan yang akan

dipilih. Proses pembuatan kebijakan yang efektif mempertimbangkan keselarasan kebijakan dengan ambisi dan agenda pemerintah. Konsistensi akan ditekankan pada tahap pengembangan kebijakan melalui konsultasi dan dialog untuk memastikan bahwa pedoman yang baru tidak bertentangan. Agenda dan program pemerintah sudah ada.

Belakangan, menurut Islamy, dalam bukunya yang berjudul Prinsip Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Islamy mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses kebijakan publik. 1) Defining Problem. Pemahaman menyeluruh tentang masalah membantu mengungkap asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab, menguraikan tujuan yang mungkin, mengintegrasikan pandangan yang bertentangan, dan merancang opsi kebijakan baru. 2) Agenda Kebijakan. Dari sekian banyak masalah umum yang muncul, hanya sedikit yang menarik perhatian para pengambil kebijakan. Pilihan dan kecenderungan perhatian pembuat kebijakan menyebabkan munculnya agenda-agenda kebijakan. 3) Pilihan Kebijakan Alternatif untuk Memecahkan Masalah. Setelah masalah publik didefinisikan dengan jelas dan pembuat kebijakan telah setuju untuk memasukkannya ke dalam agenda politik, langkah selanjutnya adalah mencari solusi untuk masalah tersebut. Fase ini menghadirkan pembuat kebijakan dengan pilihan kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah. 4) Tahap Penetapan Kebijakan. Tahap paling akhir bagi pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan.

Dalam menetapkan kebijakan pendidikan, implementasi hasil kebijakan itu penting, bahkan lebih penting daripada keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil kebijakan yang diinginkan. Menurut Ripley & Franklin, implementasi berfokus pada dua hal: kepatuhan dan apa yang terjadi? Kepatuhan

mengacu pada apakah pelaksana mengikuti prosedur yang ditetapkan atau aturan standar. Pertanyaan tentang apa yang terjadi, bagaimana proses implementasi berjalan, hambatan apa yang ditemui, apa yang dicapai, mengapa, dll.

Ada beberapa model implementasi yang terkenal untuk melihat implementasi yang sukses, , yaitu pertama ada Ada ciri-ciri masalah, kedua, struktur tata kelola program yang tercermin dari berbagai jenis regulasi yang mengatur kebijakan, dan ketiga, faktor nonregulasi. Menurut beberapa ahli ilmu sosial, termasuk yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier, yang menganggap implementasi kebijakan sebagai fungsi dari tiga variabel lebih kompleks dan kompleks daripada proses merumuskannya. Proses pelaksanaan pendidikan mencakup perangkat politik, sosial, hukum dan organisasi untuk berhasil menerapkan kebijakan pendidikan.

Tantangan ke depan adalah mempersiapkan dan memetakan tenaga kerja lulusan Industri 4.0 ke dunia kerja di era Industri 4.0. Menggunakan teknologi internet dan mengintegrasikan lini produksi industri. Industri 4.0 mencakup digitalisasi, optimalisasi dan personalisasi produksi, otomatisasi dan penyesuaian, interaksi manusia-mesin, layanan dan perusahaan bernilai tambah, pertukaran data otomatis dan komunikasi dengan teknologi Internet. Program industri baru ini telah menciptakan pekerjaan dan keterampilan baru serta kehilangan beberapa pekerjaan. Industri akan berkembang pesat dalam revolusi industri baru ini. Tantangan-tantangan ini memerlukan kebijakan yang mengantisipasi transformasi pasar tenaga kerja Indonesia, dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan bisnis dan industri, perubahan posisi dan persyaratan keterampilan. Salah satu faktor kuncinya adalah keterampilan dan kompetensi yang perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang berkembang pesat.

KESIMPULAN

Proses pembuatan kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan konsistensi

usulan kebijakan dengan rencana dan agenda pemerintah secara keseluruhan. Melalui konsultasi dan interaksi, kami menekankan koherensi dalam fase pembuatan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan baru selaras dengan agenda dan program pemerintah yang ada. Dan dalam pembuatan kebijakan, pemerintah harus cerdas untuk memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang akan menjadi masalah dimasa depan. Oleh karena itu, dunia pendidikan dan industri perlu memperhatikan perkembangan industri dan merumuskan strategi transformasi industri. pasar tenaga kerja.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Imron, (2002). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed.I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif Rohman, (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama.
- Budi Winarno, (2002). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo.
- Edi Suharto, (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama.
- Fattah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya*
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, (2008). *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.A.R. Tilaar. (1998) *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Hanisy, Asmad. (2013). Konsep dasar analisis kebijakan. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 4(1), 48-63
- Irfan Islamy, (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi aksara
- Mohammad Ariandy (2019), “ *Kebijakan*

- Kurikulum Dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia,” Sukma: Jurnal Pendidikan 3, no. 2: 137– 168.*
- Riant Nugroho,(2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab,(1991). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Shaifudin, Arif. “Peran Strategis Pendidikan Islam Di EraGlobalisasi.” *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman 6, no. September (2016): 224*
- William Dunn,(1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tribunnews.com, Era Revolusi Industri 4.0 *Harus Diantisipasi Perguruan Tinggi*,